

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II (%)
Sasaran Program 1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing					
1.1	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	84,76*	84,76*	100%*
1.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	6,76*	6,76*	100%*
Sasaran Program 2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					
2.1	Tingkat Input Maturitas Sirkular	Persentase	9,4%*	9,4%*	100%*
2.2	Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan	Nilai	Laki-laki 17.138rb; Perempuan 10.086rb*	Laki-laki 17.138rb; Perempuan 10.086rb*	100%*
Sasaran Program 3. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif					
3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan	Persentase	50%**	50%**	100%**
Sasaran Program 4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional					
4.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase	50%**	50%**	100%**
Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas					
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	Indeks	3 dari 4	3 dari 4*	100%*
Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik					
6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	Persentase	50%**	50%**	100%**

Keterangan :

* Masih bersifat proyeksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta *activity* yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan

** Target dan Realisasi berdasarkan proyeksi dan *activity* Triwulan II Tahun 2026

Kinerja Sekretariat Kementerian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing
----------	--

Pencapaian Sasaran Program 1 : Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Reformasi Birokrasi General
2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai Latar Belakang

Reformasi Birokrasi General

Kemenko Perekonomian mengukur tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi melalui 2 indikator, yaitu : Nilai RB General dan Nilai RB Tematik. Reformasi Birokrasi (RB) General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan isu-isu struktural (hulu) yang mencakup penguatan tata kelola organisasi, efektivitas atas proses bisnis, sistem kerja, dan peningkatan layanan publik. Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General ini berpedoman pada Permen PAN-RB No. 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Nilai RB General dihitung berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB terhadap capaian pelaksanaan pada indikator Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Setiap indikator memiliki bobot dan kriteria penilaian tertentu. Indikator RB General Kemenko Perekonomian terdiri dari 28 Indikator :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General
3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
4. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
5. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
7. Nilai SAKIP
8. Indeks Perencanaan Pembangunan
9. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
10. Tingkat Digitalisasi Arsip
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
12. Indeks Pengelolaan Aset
13. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
14. Indeks Kualitas Kebijakan Publik
15. Indeks Reformasi Hukum (IRH)
16. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor
17. Indeks Tata Kelola Pengadaan
18. Indeks Sistem Merit
19. Indeks Pelayanan Publik
20. Indeks SPBE
21. Capaian Prioritas Nasional
22. Capaian Indikator Kinerja Utama
23. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
24. Tindaklanjuti Rekomendasi
25. Indeks BerAKHLAK
26. Survei Penilaian Integritas
27. Survei Kepuasan Masyarakat.

Komponen yang dinilai pada RB General sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Bobot
A	Komponen Pengungkit	
	I. Pemenuhan	20,00
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00
	III. Reform	30,00
	Total Komponen Pengungkit	60,00
B	Komponen Hasil	
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
4.	Kinerja Organisasi	10,00
	Total Komponen Hasil	40,00
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00

Tujuan dari IKU ini untuk dapat menggambarkan pelaksanaan atas RB General di lingkungan Kemenko Perekonomian dijalankan secara konsisten, terukur dan ber kelanjutan sehingga menjadi alat ukur keberhasilan terhadap tata kelola organisasi

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian masih belum dapat ditentukan karena nilai ini dikeluarkan pada akhir tahun. Nilai Triwulan II ini merupakan proyeksi nilai RB General yang diharapkan tercapai pada tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	84,76	84,76*	100%*

**Proyeksi nilai RB General tahun 2026*

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 yang disampaikan oleh Kementerian PANRB, pada hasil LHE RB General nilai Kemenko Perekonomian memperoleh 80,5 poin, dengan peningkatan pada indikator – indikator :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General (Naik 0,08 poin),
2. Nilai SAKIP (Naik 0,04),
3. Indeks Pengelolaan Aset (Naik 0,005),
4. Indeks reformasi hukum (Naik 0,02),
5. Indeks tata kelola pengadaan (Naik 0,15),
6. Capaian prioritas nasional (0,25),
7. Capaian IKU (Naik 0,07), dan
8. Survey Kepuasan Masyarakat (Naik 0,42).

Namun demikian, terdapat indikator yang masih rendah dan perlu perhatian lebih, seperti :

- Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (0,5 dari 3)
- Tindak lanjut Rekomendasi BPK (63,76%)
- Indeks BerAKHLAK (82,67, masih dibawah target 85)
- Survey Penilaian Integritas (81,81 dari target 82)
- Indeks Tata Kelola Pengadaan (75,76 dari target 85)

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penetapan dan Pengesahan Persesmenko tentang Rencana aksi RB 2026 di Kemenko Perekonomian	Tertunda	Pada triwulan II masih dalam tahap pembahasan terkait dengan penyusunan rencana aksi RB General, dikarenakan Nilai RB serta catatan dan rekomendasi baru keluar pada triwulan II
2.	Implementasi Rencana Aksi RB	Terlaksana	Pelaksanaan rencana aksi telah berjalan mulai dari triwulan I sampai dengan saat ini
3.	Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi RB TW I dan II di seluruh unit kerja	Terlaksana	Tim Evaluator Internal RB melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan RB <i>General</i>
4.	Pelaporan hasil implementasi RB General TW I melalui (SIMERSI)	Tertunda	Pada triwulan II masih dalam tahap pembahasan terkait dengan penyusunan rencana aksi RB General, dikarenakan Nilai RB serta catatan dan rekomendasi baru keluar pada triwulan II
5.	Koordinasi persiapan pelaksanaan evaluasi dengan para PIC pengampu indikator RB General	Tertunda	Pada triwulan II masih dalam tahap pembahasan terkait dengan penyusunan rencana aksi RB General, dikarenakan Nilai RB serta catatan dan rekomendasi baru keluar pada triwulan II

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kementerian PANRB guna memperoleh arahan terkait format, substansi, serta peningkatan kualitas penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar selaras dengan ketentuan dan indikator penilaian yang berlaku.

2. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, dan rapat pembahasan bersama unit-unit kerja terkait sebagai bentuk penguatan kolaborasi dan sinergi dalam penyusunan serta penyempurnaan rencana aksi, sehingga menghasilkan dokumen yang lebih terintegrasi, terukur, dan mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi secara optimal.

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Kemenko Perekonomian telah melakukan Pendampingan dalam rangka penyusunan rencana aksi RB General Tahun 2026
2. Kemenko Perekonomian telah melakukan berbagai pelaksanaan rencana aksi seperti indeks reformasi hukum, indeks pelayanan publik, indeks kualitas kebijakan, dan indeks-indeks lainnya
3. Kemenko Perekonomian telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB dalam hal perbaikan-perbaikan dalam rencana aksi RB General serta telah menyusun panduan pengisian rencana aksi
4. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi penyusunan rencana aksi guna memastikan kelengkapan, keteraturan, dan kualitas dokumen yang dihasilkan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

1. Pelaksanaan rapat penyampaian sanggah yang dilaksanakan secara langsung dikantor Kemenko Perekonomian
2. Pelaksanaan rapat penyusunan tindak lanjut atas rekomendasi evaluator meso

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang Triwulan II yaitu Rp. 10.000.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Hingga Triwulan II, instansi pembina yaitu Kementerian PANRB belum menerbitkan Peraturan Menteri PANRB yang mengatur tentang pelaksanaan RB tahun 2026 dan tahun berikutnya

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Pelaksanaan RB tetap mengacu pada peraturan Kementerian PANRB sebelumnya yaitu KepmenPANRB 182 Tahun 2024 dan SE MenpanRB Nomor 6 Tahun 2025

1.2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik

Latar Belakang

Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tat kelola di sektor – sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan

RB pada periode transisi tahun 2025. Tema RB Tematik pada periode 2025 – 2029 meliputi :

1. RB Pengentasan Kemiskinan
2. RB Peningkatan Investasi
3. RB Mendorong Hilirisasi
4. RB Mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan
5. RB Mendukung Ketahanan Pangan
6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Tujuan dari indikator kinerja utama ini, untuk menggambarkan tingkat keterlibatan Kemenko Perekonomian dalam penyelesaian isu-isu strategis nasional yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU ini pada tahun 2026 bernilai 6,76 poin. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target peningkatan tahun sebelumnya. Hingga Triwulan II tahun 2026, nilai Reformasi Birokrasi Tematik belum dapat ditentukan karena penilaian dilaksanakan pada akhir tahun oleh Kemenpan RB. Nilai Triwulan II ini merupakan proyeksi nilai RB Tematik yang diharapkan tercapai pada tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 1.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	6,76	6,76*	100%*

*Proyeksi nilai RB Tematik tahun 2026

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penetapan dan pengesahan Persesmenko tentang Rencana Aksi RB Tahun 2026 di Kemenko Perekonomian	Tertunda	Pada triwulan II masih dalam tahap pembahasan terkait dengan penyusunan rencana aksi RB Tematik, dikarenakan Nilai RB serta catatan dan rekomendasi baru keluar pada triwulan II
2.	Implementasi rencana aksi RB	Terlaksana	Pelaksanaan rencana aksi telah berjalan mulai dari triwulan I sampai saat ini

3.	Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB TW I dan II di seluruh unit kerja	Terlaksana	Tim Evaluator Internal RB melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan RB Tematik
4.	Pelaporan hasil implementasi RB Tematik TW I melalui (SIMERSI)	Tertunda	Pada triwulan II masih dalam tahap pembahasan terkait dengan penyusunan rencana aksi RB Tematik, dikarenakan Nilai RB serta catatan dan rekomendasi baru keluar pada triwulan II
5.	Koordinasi persiapan pelaksanaan evaluasi dengan para PIC pengampu indikator RB Tematik	Tertunda	Pada triwulan II masih dalam tahap pembahasan terkait dengan penyusunan rencana aksi RB Tematik, dikarenakan Nilai RB serta catatan dan rekomendasi baru keluar pada triwulan II

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1. Penyusunan pohon kinerja sebagai kerangka kerja yang menggambarkan hubungan logis antara sasaran, program, kegiatan, hingga intervensi pada setiap tema Reformasi Birokrasi Tematik. Instrumen ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian outcome yang ditargetkan.
2. Pelaksanaan koordinasi intensif dengan unit kerja terkait untuk mengidentifikasi dan memetakan program, kegiatan, serta output yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Tematik.
3. Pengumpulan, penataan, dan verifikasi data beserta dokumen pendukung pada masing-masing tema Reformasi Birokrasi Tematik sebagai dasar penyediaan bukti dukung dan pengukuran capaian pelaksanaan program.
4. Penyusunan rancangan rencana aksi beserta instrumen pemantauan sebagai acuan dalam mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, sehingga keterkaitan antara target, 35 implementasi kegiatan, dan hasil yang dicapai dapat terjaga secara konsisten.
5. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan Kementerian PANRB untuk memperoleh masukan, klarifikasi, serta arahan mengenai implementasi kebijakan, metode pengukuran, dan pemenuhan dokumen evidence Reformasi Birokrasi Tematik sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Kemenko Perekonomian dalam proses melakukan penyusunan pohon kinerja dan konsep dari rencana aksi RB Tematik
2. Kemenko Perekonomian telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB dalam hal perbaikan-perbaikan dalam rencana aksi RB Tematik serta telah menyusun panduan pengisian rencana aksi

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui optimalisasi data dan dokumen yang telah tersedia sebagai bahan penyusunan dokumen RB Tematik, sehingga mengurangi kebutuhan pengumpulan data baru dan menghindari duplikasi pekerjaan. Dari aspek sumber daya manusia, penyusunan pohon kinerja, pemetaan intervensi, dan rencana aksi dilakukan secara kolaboratif dengan unit kerja terkait tanpa penambahan personel khusus. Dari aspek anggaran, koordinasi dan pembahasan dilaksanakan secara daring, hybrid, atau terintegrasi dengan agenda rapat yang telah ada sehingga meminimalkan biaya operasional dan perjalanan dinas. Selain itu, pelaksanaan RB Tematik diintegrasikan dengan proses Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang telah berjalan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan data, monitoring, dan pelaporan kinerja.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang Triwulan II yaitu Rp. 10.000.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Hingga Triwulan II, instansi pembina yaitu Kementerian PANRB belum menerbitkan Peraturan Menteri PANRB yang mengatur tentang pelaksanaan RB tahun 2026 dan tahun berikutnya
- Belum terdapatnya penentuan tema kepada Kemenko Perekonomian tentang RB tematik yang diamantakn oleh KemenPANRB

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Pelaksanaan RB tetap mengacu pada peraturan Kementerian PANRB sebelumnya yaitu KepmenPANRB 182 Tahun 2024 dan SE MenpanRB Nomor 6 Tahun 2025

2

Sasaran Program 2 : Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2 : Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Input Material Sirkular
2. Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

2.1 Tingkat Input Material Sirkular

Latar Belakang

Berdasarkan Peta Jalan (*Road Map*) dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2045. Terdapat 5 (lima) sektor prioritas penerapan ekonomi sirkular yaitu sektor pangan, tekstil, konstruksi, elektronik, dan retail (berfokus pada kemasan plastik). Tingkat input material sirkular merupakan indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam meningkatkan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material. Khususnya dalam hal penggunaan kembali material (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan pemanfaatan materi limbah kembali ke dalam rantai produksi. Penyusunan tingkat material sirkular (*circular material input rate*) berkaitan erat dengan kebutuhan global untuk beralih dari model ekonomi linear ke ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan RPJMN tahun 2025 - 2029, proyek prioritas yang menjadi kawalan Kementerian Perekonomian dalam menkoordinasikan kebijakan pada sektor Material Sirkular adalah :

1. Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitasi pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular
2. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Nikel
3. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Tembaga
4. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Bauksit
5. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Timah
6. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Kimia

Tingkat input material sirkular disusun sebagai alat ukur untuk mengevaluasi dan mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan kembali material yang sudah ada, mengurangi limbah, dan mengurangi dampak lingkungan dari ekstraksi bahan mentah. Sebagai arah dari kebijakan nasional menuju siklus ekonomi sirkular diharapkan dapat digunakan sebagai solusi terhadap krisis lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh ekonomi linear yang diharapkan dapat berdampak pada efisiensi ekonomi dan penghematan biaya jangka panjang dengan mengurangi ketergantungan pada penggunaan bahan mentah (*virgin material*), mendorong industri baru dan menciptakan lapangan kerja hijau dalam sektor pengelolaan limbah dan teknologi bersih ramah lingkungan.

Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi sirkular berkelanjutan, perlu adanya pengukuran secara kuantitatif terhadap tingkatan input material sirkular agar dampaknya dapat dianalisis dan ditingkatkan sehingga dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Sehingga diharapkan implementasi material sirkular memberikan manfaat nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang menerapkan pendekatan sistemik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Terdapat 3 arah kebijakan dan indikator utama Ekonomi Sirkular di Indonesia, antara lain:

1. Pengurangan penggunaan sumber daya dengan indikator Tingkat Input Material Sirkular. Indikator ini mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam produksi barang atau jasa. 'Tingkat Input Material Sirkular' tidak hanya mencakup penggunaan bahan daur ulang tetapi juga bahan yang digunakan kembali - termasuk reuse, refurbish, remanufaktur, dan penggunaan bahan terbarukan dalam sebuah produk. Indikator ini serupa dengan 'tingkat penggunaan secondary raw material' dan 'konten daur ulang', namun memiliki cakupan yang lebih luas yang mempertimbangkan semua jenis penggunaan bahan sekunder. Dengan baseline target tahun 2023 sebesar 9%, target pada 2026 sebesar 9,4% dan pada 2029 sebesar 10%.
2. Perpanjangan daya guna produk dan material, dengan indikator Tingkat Daya Guna.
3. Peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi, dengan indikator Tingkat Daur Ulang.

Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang berfokus pada 5 sektor prioritas dan aspek pendukung ekosistem sebagai acuan para pemangku kepentingan dalam mendorong transisi dari ekonomi linear menjadi sirkular di Indonesia. Lima sektor utama prioritas penerapan ekonomi sirkular di Indonesia antara lain: Pangan,

Retail (fokus pada kemasan plastik), elektronik, konstruksi, dan tekstil). Kelima sektor ini mempresentasikan hampir 1/3 dari PDB Indonesia dan mempekerjakan >43 juta orang pada 2019.

Persentase indikator dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumusnya :

$$\text{Tingkat Input Material Sirkular} = \frac{\text{Jumlah PRO-P yang menerapkan Prinsip Sirkular}}{\text{Total PRO-P yang dikoordinasikan}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026 nilai dari tingkat input material sirkular sebesar 9,4 berdasarkan proyeksi yang akan dicapai pada tahun 2026. Adapun hasil penilaian kinerja dari IKU ini dapat di gambarkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular	persentase	9,4%*	9,4%*	100%*

**Nilai masih bersifat proyeksi*

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Pelaksanaan koordinasi antar lintas K/L terhadap arah kebijakan Circular Economy	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait proyek pengembangan daur ulang baterai kendaraan listrik dan manajemen elektronik sirkular sebagai bagian dari pelaksanaan RAN-ES pada 29 April 2026. - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Strategis: Rencana Pembentukan <i>Steering Group</i> Ekonomi Sirkular pada tanggal 19 Mei 2026.

2.	Penyusunan arah penguatan kebijakan insentif dan disinsentif nasional	Terlaksana	Telah dilaksanakan FGD dengan BRIN terkait penajaman kajian kebijakan penguatan industrialisasi kendaraan listrik melalui insentif TKDN dan pengelolaan limbah baterai pada 16 April 2026
3	Pengumpulan data penggunaan material sirkular di Kementerian Teknis	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan data penggunaan material sirkular di Kementerian Teknis

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

- FGD Penerapan Ekonomi Sirkular di Daerah yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada 23 Januari 2026.
- Rapat koordinasi *kick-off* proyek pengembangan daur ulang baterai kendaraan listrik dan manajemen elektronik sirkular pada 27 Februari 2026.
- Mengikuti kegiatan *Knowledge Exchange to Europe on Circular Economy Implementation in the EU and its Member States* di Belgia dan Belanda pada 20-24 April 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *worksho*
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang Triwulan II yaitu Rp. 34.569.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Masih terkendala kelembagaan yang belum final dan saat ini masih dalam tahap pembentukan *steering committee*

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Tingkat Input material Sirkular.

2.2 Pengeluaran Latar Belakang

Perkapita

Laki-Laki

dan

Perempuan

Berdasarkan RPJMN th. 2025-2029, Kesenjangan gender dan penguatan peran perempuan merupakan Program Prioritas Nasional yang ke-4. Kesenjangan gender laki-laki dan perempuan dan penguatan peran perempuan merupakan salah satu indikator pada PN ke-4 yang disasar melalui peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang. Salah satu diantaranya diukur melalui indikator pengeluaran perkapita laki – laki dan perempuan. Indikator ini mengukur kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita antara penduduk laki – laki dan perempuan sebagai salah satu parameter disparitas kesejahteraan ekonomi berdasarkan gender. Adapun isu/permasalahan yang menjadi atensi awal dari IKU ini adalah terkait:

1. Partisipasi ketenagakerjaan masih rendah
2. Perekonomian masih didominasi laki-laki
3. Kesenjangan upah
4. Kewirausahaan perempuan masih rendah
5. Literasi digital perempuan lebih rendah
6. Inklusi dan literasi keuangan $p > I$

Selanjutnya, isu/permasalahan tersebut diolah menjadi dokumen keluaran yang meliputi:

1. Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
3. Kertas Kerja Kebijakan;
4. Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu:

1. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan Perempuan
2. Rekomendasi kebijakan terkait peran dan efektifitas perempuan untuk memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, kegiatan utama yang difokuskan pada pengumpulan data yang terpilah menurut jenis kelamin, baik melalui survei, data statistik sosial ekonomi, maupun sumber administratif lainnya. Pengumpulan data ini mencakup partisipasi laki-laki dan perempuan pada instrument kegiatan ekonomi seperti TPAK, literasi digital, inklusi dan literasi keuangan, dan instrumen lainnya.

Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan hingga Triwulan II 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 2.2 Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan	Ribu Rupiah	Lk :17.138rb; Pr : 10.086*	Lk :17.138rb; Pr : 10.086*	100%*

*Nilai masih bersifat proyeksi

Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) merupakan indikator yang mengukur besaran pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga. Perhitungannya menggunakan pendekatan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga antarwilayah serta pembobotan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2026, target pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp17.138 ribu per tahun dan perempuan sebesar Rp10.086 ribu per tahun. Adapun pada akhir periode RPJMN tahun 2029, nilai PPLP ditargetkan meningkat menjadi Rp17.899 ribu untuk laki-laki dan Rp10.603 ribu untuk perempuan. Target tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan bagi laki-laki maupun perempuan.

Meskipun tren PPLP ditargetkan terus meningkat, pencapaian target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja, dominasi laki-laki pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas dan pendapatan lebih tinggi, serta masih adanya kesenjangan upah menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat pengeluaran per kapita. Di samping itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan kewirausahaan masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya didukung oleh akses yang setara terhadap teknologi digital maupun layanan keuangan. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat literasi dan inklusi keuangan perempuan yang masih berada di bawah laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender agar peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Hingga Triwulan II 2026, dalam pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan, disampaikan sebagai berikut:

- Sekretariat mengawal indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian, salah satunya yaitu terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan
- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian.
- Sinkronisasi kebijakan terkait peningkatan partisipasi ekonomi perempuan melalui identifikasi hambatan struktural ketenagakerjaan, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penguatan keterampilan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektor yang mendukung pencapaian indikator Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) dengan LPEM UI.
- Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai forum koordinasi dan pertukaran informasi terkait isu-isu strategis yang mempengaruhi partisipasi dan kesejahteraan ekonomi perempuan
- Melakukan pendalaman isu dan identifikasi tantangan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, antara lain terkait akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, dan penguatan ekosistem usaha yang inklusif
- Menghimpun masukan dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan sinkronisasi kebijakan dan pengendalian program yang mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya pengumpulan masukan dan sinkronisasi kebijakan yang mendukung pencapaian target indikator Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan.

Proyeksi triwulan II tahun 2026 tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II 2025. Kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sehingga diprediksi penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II 2026 sebagai berikut:

IKU 2.2 Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Sinkronisasi program dan kebijakan dalam upaya pengurangan kesenjangan pengeluaran Gender	Terlaksana	Telah dilaksanakan sinkronisasi kebijakan melalui pembahasan dan pemetaan kebijakan terkait peningkatan partisipasi ekonomi perempuan.
2.	Pelaksanaan Fasilitasi workshop kebijakan pengeluaran gender	Terlaksana	Telah dilaksanakan pembahasan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan bersama pemangku kepentingan terkait sebagai dukungan peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan dan pencapaian indikator Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan pada 13 Mei 2026.
3.	Monitoring realisasi pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan	Terlaksana	Pengisian Evaluasi PUG mandiri sebagai penguatan basis data dan kebijakan responsif gender dalam mendukung pencapaian indikator PPLP.

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Pengisian Evaluasi PUG mandiri melalui aplikasi evaluasi PUG sebagai instrumen pemetaan kondisi demografi sekaligus penguatan basis data kesetaraan gender di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa, 24 Februari 2026.

- Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Provinsi Banten sebagai upaya mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, termasuk akses terhadap lapangan kerja, kewirausahaan, literasi keuangan, dan penguatan kapasitas usaha perempuan pada 13 Mei 2026.



- Menghadiri Rapat Koordinasi Multipihak terkait dengan Perencanaan Kebijakan Ekonomi Perawatan (Care Economy) 2026-2027 pada tanggal 05 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Memanfaatkan FGD sebagai sarana koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu forum pembahasan.
- Mengoptimalkan data, hasil kajian, dan informasi yang telah tersedia sebagai bahan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan tanpa memerlukan pengumpulan data primer tambahan.
- Memanfaatkan media berbagi data dan dokumen secara elektronik untuk mendukung koordinasi, pertukaran informasi, serta tindak lanjut hasil pembahasan secara lebih cepat dan efisien.
- Mengintegrasikan pembahasan isu ketenagakerjaan, kewirausahaan, literasi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam satu rangkaian kegiatan guna menghindari duplikasi pelaksanaan forum koordinasi.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II yaitu Rp. 29.798.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Capaian indikator Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) dipengaruhi oleh berbagai faktor lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi dan sinergi dengan banyak kementerian/lembaga terkait.
- Masih terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi partisipasi ekonomi perempuan, antara lain beban pengasuhan, keterbatasan akses

terhadap kesempatan kerja, serta kesenjangan keterampilan yang dapat berdampak pada capaian indikator PPLP.

- Ketersediaan data dan informasi pendukung yang diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator masih perlu diperkuat melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi laki-laki dan perempuan.
- Melakukan identifikasi dan pendalaman isu strategis yang mempengaruhi partisipasi ekonomi perempuan melalui forum koordinasi, rapat, dan pemanfaatan hasil kajian dari berbagai pemangku kepentingan.
- Memperkuat pengumpulan dan pemanfaatan data serta informasi pendukung sebagai dasar perumusan kebijakan dan rekomendasi yang mendukung pencapaian indikator PPLP.
- Mendorong penguatan perspektif gender dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan.

3

Sasaran Program 3 : Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efisien

Pencapaian Sasaran Program 3 : Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efisien ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan

3.1 Persentase Latar Belakang

Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan

Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dilaksanakan melalui forum koordinasi, fasilitasi, dan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Indikator Utama ini menekankan *outcome*, tingkat penerimaan dan pemanfaatan konkret dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan.

Adapun rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2026 adalah :

1. Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
Kegiatan ini mencerminkan peran dari Kemenko Ekon dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, terintegritas, dan berdampak. Melalui koordinasi ini diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak terjadi duplikasi kebijakan, stagnasi pelaksanaan, atau konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga
2. Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan distribusi yang merata antar daerah, antar wilayah, serta kelompok masyarakat.

Rumus Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti:

$$\% \text{ R. Kebijakan Lintas Sektor} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Terselesaikan}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti telah terealisasi sebesar 50%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada proses penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektoral hingga Triwulan II 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	Persen	50%	50%*	100%*

*Hasil Realisasi dan %Kinerja berdasarkan pengukuran activity,

Kebijakan lintas sektor yang aktivitasnya telah dilaksanakan hingga Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Syariah

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan industri halal global. Potensi tersebut tercermin dalam *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026*, yang menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia dalam *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)*, dengan capaian unggulan berupa peringkat pertama dunia pada sektor modest fashion, peringkat ketiga pada sektor makanan halal, dan peringkat kedua pada sektor pariwisata ramah muslim, yang menunjukkan daya saing Indonesia pada berbagai sektor strategis ekonomi syariah meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam penguatan ekosistem halal nasional. Dalam rangka mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, dan organisasi profesi. Salah satu mitra strategis adalah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang memiliki kapasitas keilmuan dan jejaring nasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara IAEI dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan mampu memperkuat perumusan kebijakan, memberikan rekomendasi berbasis kajian ilmiah, serta mendukung percepatan pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang berdaya saing. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga terus mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam penguatan industri halal nasional, termasuk Program Wajib Halal Oktober (WHO) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta berbagai program percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal, memperluas akses UMKM terhadap sertifikasi halal, serta memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar domestik maupun global.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Ekonomi Syariah, disampaikan sebagai berikut:

- Melakukan pembahasan rancangan Program Kerja Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam.
- Mengawal Pembahasan Isu Halal dan Isu Strategis Lainnya pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).
- Monitoring implementasi serta kerja sama sektor prioritas, khususnya terkait sertifikasi halal dan fasilitasi perdagangan dalam kerangka Pasar Tunggal Uni Eropa (EU Single Market).
- Melakukan pembahasan rancangan Program Kerja Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) melalui Rapat Rutin Badan Pengurus Harian inti IAEI
- Menjadi Keynote Speaker at AmCham Indonesia Halal Workshop 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem Halal dalam negeri.

2. Indonesia National Single Window (INSW)

INSW merupakan sistem elektronik nasional yang mengintegrasikan proses perizinan ekspor, impor, dan logistik antar instansi pemerintah dalam satu platform digital. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, tujuan utama INSW adalah meningkatkan sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga dalam memberikan efisiensi pelayanan publik yang terintegrasi serta terdigitalisasi di bidang ekspor, impor, dan logistik. INSW terus berupaya untuk meningkatkan daya saing nasional, kinerja logistik nasional, iklim ekosistem investasi, serta memberikan kemudahan berusaha.

Isu strategis yang akan diselesaikan pada tahun 2026 antara lain: penyesuaian regulasi PP Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), serta mekanisme pengawasan *Strategic Trade Management* (STM). PP Nomor 28 Tahun 2025 telah mengamanatkan agar perizinan ekspor, impor, serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor (Iartas) dan neraca komoditas (NK) diajukan melalui sistem INSW. Indonesia juga akan menerapkan Strategic Trade Management (STM) dalam rangka pengawasan ekspor. Hal ini dikarenakan STM menjadi salah satu persyaratan dalam negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat.

Hingga triwulan II Tahun 2026, telah dilaksanakan pembahasan terkait Indonesia Single Risk Management (ISRM) dalam rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) Tahun 2025-2026 Khususnya pada agenda pembentukan mandat Implementasi ISRM dan Integrasi data perdagangan internasional Selanjutnya telah dilaksanakan pembahasan terkait Mekanisme Pengawasan Strategic Trade Management (STM) dimana sedang mengkaji bentuk regulasi STM (Perpres atau Undang-Undang), serta menentukan lembaga pengampu (K/L tertentu, Satgas bersama, atau Lembaga baru). Serta dirancang mekanisme pelacakan barang *dual-use* untuk komoditas kenukliran, biologi, kimia, teknologi, dan sebagainya, dari asal barang hingga pengguna akhir (end-user) untuk memenuhi ketentuan dalam konvensi internasional.

3. Patriot

Sebagai bagian dari pelaksanaan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada Prioritas Nasional (PN)

I. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dan menindaklanjuti Matriks Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2025-2029 pada tahun 2025, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus melaksanakan pendampingan, koordinasi, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan integrasi pembinaan ideologi Pancasila dengan agenda pembangunan nasional berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata.

Kemenko Perekonomian, melalui Sekretariat turut mendukung penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi lintas K/L terkait tujuan, sasaran, dan indikator pembinaan ideologi Pancasila agar pelaksanaannya berjalan selaras dan terukur.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Program Patriotisme, disampaikan sebagai berikut:

- Melaksanakan Pembahasan Konfirmasi Capaian Penanggulangan Bencana Tahun 2025, Kementerian/Lembaga diminta menyampaikan dan memvalidasi data capaian penanggulangan bencana tahun 2025 sementara BNPB akan menyempurnakan hasil verifikasi sebagai dasar penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi RIPB Tahun 2025;
- Mengikuti Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029, pada RAN PE Tahun 2026-2029 Kemenko Perekonomian menjadi salah satu Kementerian terkait yang mengurus permasalahan potensi meningkatnya angka pengangguran akibat kurangnya keterampilan dan kesediaan lapangan kerja yang meningkatnya terhadap paparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme;
- Melaksanakan Rapat Permohonan Pengisian serta Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Peta Jalan PIP Periode TW I Tahun 2026, Kementerian/Lembaga agar melakukan penyesuaian program sesuai perkembangan kebijakan dan kondisi pelaksanaan dengan tetap memperhatikan substansi Peta Jalan PIP serta menjaga koordinasi dan pelaporan;
- Melaksanakan Rapat Diseminasi dan Peluang Kolaborasi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, adapun rencana tindak lanjut strategis yang akan dilaksanakan adalah percepatan regulasi, penyusunan peta jalan, penguatan kapasitas dan pendampingan, audit dan evaluasi serta inklusi aktif;
- Menindaklanjuti atas Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atas usulan Pejabat sebagai Anggota Tim Sekretariat Bersama dan Tim Kelompok Kerja K/L RAN PE Tahun 2026-2029.

Dalam kegiatan ini, membahas penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, ke depan akan dilakukan inventarisasi praktik baik, penyelarasan indikator pelaksanaan, serta penguatan integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam program dan kebijakan pembangunan nasional guna memastikan implementasi berjalan konsisten.

4. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Strategis (Satgas P2SP)

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Pemerintah yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi lintas

kementerian/lembaga melalui Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Strategis (Satgas P2SP). Pembentukan Satgas P2SP didasarkan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2025 tentang Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Unit Pendukung dalam Rangka Percepatan Program Strategis Pemerintah.

Seiring dengan dinamika pelaksanaan Program Strategis Pemerintah dan kebutuhan penguatan kelembagaan dalam mendukung agenda percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, kelembagaan Satgas P2SP kemudian mengalami transformasi menjadi Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3MPPE) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan susunan tugas dijabarkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua I Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi No. 313 Tahun 2026 tentang Sekretariat, Kelompok Kerja dan Unit Pendukung Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam struktur organisasi Satgas, Sekretariat berperan sebagai unsur pendukung yang melaksanakan fungsi administrasi, koordinasi, pengendalian, penyusunan laporan, pengelolaan data dan informasi, serta fasilitasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan Unit Pendukung. Salah satu fungsi strategis yang dijalankan adalah **Kanal Debottlenecking**, yaitu mekanisme identifikasi, inventarisasi, koordinasi, dan fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan pelaksanaan Program Strategis Pemerintah agar target pelaksanaan dapat tercapai secara tepat waktu, efektif, dan akuntabel.

Hingga tanggal akhir Juni 2026, Kanal Debottlenecking telah menerima 163 aduan yang berasal dari berbagai badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari keseluruhan aduan yang diterima, 122 aduan (74,85%) telah berhasil diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kanal Debottlenecking telah berfungsi secara efektif sebagai mekanisme fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan Program Strategis Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Kanal Debottlenecking pada Satgas P3MPPE, diperlukan sejumlah langkah penguatan yang berorientasi pada transformasi digital, peningkatan tata kelola, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Proyeksi triwulan II tahun 2026 tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2025. Hal ini dikarenakan indikator penyelesaian rekomendasi lintas sektor dapat dilaksanakan dengan baik pada triwulan II. Identifikasi isu dan permasalahan, serta sinkronisasi dan koordinasi kebijakan lintas sektor telah dilaksanakan dan diprediksi penyelesaian rekomendasi kebijakan lintas sektor dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Koordinasi antar KL terhadap rekomendasi kebijakan lintas sektor	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Konfirmasi Capaian Penanggulangan Bencana Tahun 2025 pada 9 April 2026. - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Isu Strategis Rakor Dewan Pengarah INSW pada 16 April 2026. - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dan Integrasi data Indonesia-Singapura pada 22 April 2026. - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan SEAFEC pada 22 April 2026. - Telah mengikuti Sosialisasi Peraturan Presiden No 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029 pada 23 April 2026.
2.	Terhimpunnya masukan atau feedback unit kerja terkait rekomendasi kebijakan yang telah disirkulasikan	Terlaksana	Kanal Debottlenecking berperan sebagai forum koordinasi yang memfasilitasi pembahasan lintas sektor guna membangun kesepahaman, menyelaraskan kebijakan, serta merumuskan alternatif

			penyelesaian yang tetap memperhatikan kewenangan masing-masing instansi. Dalam hal diperlukan perubahan kebijakan atau harmonisasi regulasi, hasil pembahasan debottlenecking menjadi bahan rekomendasi kepada pimpinan Satgas untuk diteruskan kepada kementerian/lembaga yang berwenang.
3.	Meningkatnya koordinasi lintas KL terkait penyempurnaan substansi rekomendasi kebijakan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pleno Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Fasilitas Sertifikat Halal di Lingkungan Kementerian Perindustrian pada 29 April 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Peta Jalan PIP Periode TW I Tahun 2026 pada 12 Mei 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam pada 22 Mei 2026 • Telah dilaksanakan Diskusi Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW pada 26 Mei 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Diseminasi dan Peluang Kolaborasi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada 17 Juni 2026.

			• Telah dilaksanakan Persiapan Rapat Dewan Pengarah INSW Semester I Tahu 2026 pada 18 Juni 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Capaian Isu Strategis Implementasi <i>Strategic Trade Management</i> (STM) pada 22 Juni 2026.
--	--	--	---

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Telah dilaksanakan Rapat Internal Pemetaan Indikator, Isu, dan Usulan Program Kerja Tahun 2026 terkait dengan Ekonomi Syariah.
- Menghadiri Rapat Pembahasan Usulan Program Kerja Komite Pengembangan UMKM Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) pada 21 Januari 2026.
- Menghadiri Rapat Finalisasi Usulan Program Kerja Bidang VIII Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia pada 22 Januari 2026.
- Menyusun bahan Ekonomi Syariah Indonesia dalam acara Seminar Internasional BPOM: “Advancing Vaccines and ATMPs Regulatory Development and R&D Ecosystem Pathways from Upstream to Downstream” pada 28 Januari 2026.
- Menghadiri FGD Rancangan Hukum dan Regulasi *Strategic Trade Management* (STM) di Indonesia pada 5 Februari 2026
- Menghadiri Sosialisasi Standar Tata Kelola Pengembangan Layanan SINSW pada 10 Februari 2026.
- Menghadiri Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Pengisian Form Quick Win Program Moderasi Beragama pada 12 Maret 2026.
- Menghadiri Rapat Pembahasan Isu Halal dan Isu Strategis Lainnya pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) Indonesia – Amerika Serikat pada 13 Maret 2026.
- Menghadiri Rapat Rutin Badan Pengurus Harian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (BPH IAEI) pada 8 April 2026 dan 25 Mei 2026.
- Menjadi Keynote Speaker at AmCham Indonesia Halal Workshop 2026 dengan tema “Industry Readiness for the October 2026 Deadline” pada 3 Juni 2026.
- Telah menindaklanjuti Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atas usulan Pejabat sebagai Anggota Tim Sekretariat Bersama dan Tim Kelompok Kerja K/L RAN PE Tahun 2026-2029 pada 30 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pelaksanaan kegiatan *Coaching*
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.

- Dilakukan kolaborasi pembiayaan dengan stakeholder terkait.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang Triwulan II yaitu Rp. 25.587.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih perlunya penyelarasan program kerja diantara Komite Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam IAE
2. LNSW terkendala dalam penerapan kebijakan ISRM dikarenakan secara eksplisit tidak memiliki mandat sebagai dasar hukum terkait kewenangan pengelolaan manajemen risiko terintegrasi serta pemanfaatan *risk scoring* lintas kementerian/lembaga.
3. Kanal Debottlenecking belum tersedia informasi yang bersifat real time, sehingga proses monitoring, validasi, dan pengambilan keputusan terkadang masih bergantung pada penyampaian data secara manual atau melalui koordinasi langsung dengan unit terkait.

Beraskan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja di tiap kementerian/lembaga terkait.
2. Penyelenggaraan forum evaluasi berkala terhadap tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga dalam memenuhi target penyelesaian yang telah ditetapkan.
3. Optimalisasi peran Sekretariat sebagai koordinator pengendalian tindak lanjut hasil debottlenecking.

4

Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Nasional

Pencapaian Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Nasional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

4.1 Persentase

Penyelesaian

Dokumen

Penyelenggaraan

Tata Kelola

Pemerintahan

Latar Belakang

Persentase penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola pemerintah merupakan ukuran yang menggambarkan capaian atas penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyelesaian Dokumen Tata kelola merupakan hasil dari proses bisnis sekretariat yang berfokus pada empat bidang utama yakni perencanaan, hukum dan organisasi, umum dan sumber daya manusia dan komunikasi, layanan informasi dan persidangan. Seluruh Dokumen Tata Kelola yang dihasilkan harus mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh instansi pembina. Adapun kriteria yang menunjukkan bahwa dokumen yang dihasilkan telah sesuai dengan standar apabila (1) Format dan Subtansi telah

sesuai dengan acuan yang digunakan, (2) Dokumen dihasilkan tepat waktu, (3) Dokumen yang mendapatkan sedikit perbaikan dari instansi pembina.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, nilai Reformasi Birokrasi yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 100% dari target Triwulan II 2026 sebesar 25% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah	Persen	50%*	50%*	100%*

**Hasil Realisasi dan %Kinerja TW II berdasarkan pengukuran activity,*

Sekretariat berfungsi menyelenggarakan penyelesaian dokumen pemerintahan di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian, yang berfokus pada 4 komponen utama yakni perencanaan kinerja dan kerja sama; hukum dan organisasi; umum dan sumber daya manusia; dan komunikasi layanan informasi dan persidangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Tersedianya laporan kinerja Triwulan II	Terlaksana	Laporan kinerja Triwulan II Sekretariat sudah disusun kemudian ditetapkan oleh Menteri yang dilanjutkan dengan proses upload ke dalam Aplikasi Kinerja Ekon GO beserta dengan Data Dukung Kinerja di Triwulan II (https://kinerja.ekon.go.id)
2.	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB General & Tematik	Terlaksana	Tim Evaluator Internal RB melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan RB General & Tematik

3.	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan dan pengembangan konsep SOP Pengajuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selaras dengan bahan masukan peta proses bisnis
4	Tersusunnya standar pelayanan (SP)	Terlaksana	Pelaksanaan layanan keprotokolan dan ketatausahaan yang sesuai dengan standar pelayanan
5	Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan (AP)	Terlaksana	Melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (SIMERSI), evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan, sehingga pelaksanaan rencana aksi dapat dipantau secara transparan, terukur, dan akuntabel.
6	Tersedianya layanan pengelolaan sistem informasi dan penyediaan data	Terlaksana	Telah dilakukan layanan pengelolaan system informasi dan penyediaan data
7	Terselesaikannya dokumen perumusan produk hukum	Terlaksana	Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang statusnya sudah selesai dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun masih dalam proses pembahasan. Peraturan perundang-undangan yang sudah selesai dikoordinasikan beberapa di antaranya telah diundangkan sedangkan beberapa lainnya masih dalam proses pengesahan. Sementara itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang masih dalam proses pembahasan, sedang dilakukan pengharmonisan, pembulatan, maupun pemantapan; dan Untuk melaksanakan Amanat Pasal

			96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, setiap pembentukan Rancangan PUU diselenggarakan kegiatan konsultasi publik untuk menyaring partisipasi publik yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Rancangan PUU.
8	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, RKAKL, DIPA, POK dan laporan Monev	Terlaksana	Sudah disusun dokumen Rencana Kerja, RKAKL, DIPA, POK dan laporan Monev
9	Penyusunan Dokumen Strategi Komunikasi Publik	Terlaksana	Tersusunnya 12 dokumen Strategi Komunikasi Publik Kemenko Perekonomian
10	Penyusunan dokumen notula rapat Menko Perekonomian	Terlaksana	Sudah ada dokumen notula rapat Menko Perekonomian. seluruh naskah telah disampaikan tepat waktu, minimal 1 jam sebelum kegiatan berlangsung, tanpa keterlambatan.
11	Penyusunan dokumen tata Kelola SDM, pengadaan dan keuangan Triwulan II	Terlaksana	Tersusunnya dokumen tata Kelola SDM, pengadaan dan keuangan Triwulan II

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

- Menyusun dan menetapkan SKP triwulan II pada seluruh pegawai Kemenko Perekonomian
- Rapat dengar pendapat atas masukan dan saran dokumen rancangan revisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 19/2022 bersama Kementerian PAN RB dan Akademisi.
- Optimalisasi ruang penyimpanan dokumen pendukung narasi kinerja triwulan I dan II tahun 2026 pada Ekon GO.
- Mengikuti sosialisasi *Kick Off Meeting* Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2026 dan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB melalui surat Undangan No. B/25/AA.01/2026
- Pemutakhiran pohon kinerja unit-unit kerja sebagai tindaklanjut atas evaluasi Kementerian PAN RB
- Persiapan untuk melaksanakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2026 tingkat Kementerian oleh Kemenpan RB

- Memperkuat koordinasi lintas kedeputian dan unit kerja melalui forum koordinasi rutin, harmonisasi kebijakan, serta penyelarasan indikator kinerja lintas sektor.
- Melaksanakan *refocusing* penggunaan anggaran pada masa efisiensi
- Melaksanakan koordinasi persiapan (*Entry Meeting*) evaluasi AKIP Kementerian oleh Kemenpan RB dan persiapan (*Entry Meeting*) evaluasi AKIP Internal Eselon I oleh Inspektorat
- Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja dengan seluruh unit kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi
- Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, dan rapat pembahasan bersama unit-unit kerja terkait sebagai bentuk penguatan kolaborasi dan sinergi dalam penyusunan serta penyempurnaan rencana aksi, sehingga menghasilkan dokumen yang lebih terintegrasi, terukur, dan mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi secara optimal.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pelaksanaan kegiatan *Coaching*
- Optimalisasi Aplikasi SIMERSI
- Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive, One Drive, dst)
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting kantor;

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang Triwulan II yaitu Rp. 34.995,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Hingga Triwulan II, instansi pembina yaitu Kementerian PANRB belum menerbitkan Peraturan Menteri PANRB yang mengatur tentang pelaksanaan RB tahun 2026 dan tahun berikutnya
- Belum terdapatnya penentuan tema kepada Kemenko Perekonomian tentang RB tematik yang diamanatkan oleh KemenPANRB

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Memperkuat mekanisme koordinasi antar-unit melalui penetapan jadwal kerja yang lebih terstruktur serta penerapan sistem pemantauan capaian secara berkala

Pencapaian Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Layanan Prima yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

**5.1 Indeks
Kepuasan
Layanan
Sekretariat**

Latar Belakang

Layanan Sekretariat adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. **Sekretariat Kemenko Perekonomian juga menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :**

1. Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perekonomian
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi ketatausahaan, SDM, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas, arsip
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
6. Pengelolaan data dan informasi
7. Pelaksanaan fungsi lainnya

Indikator kepuasan layanan Sekretariat mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Kemenko Perekonomian. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);

Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan

2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);

Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan

3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);

Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan

4. Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);

Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman

5. Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)

Menunjukan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum ada, dengan ringkasan table Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3 (Baik)*	100%

Laporan Survei Kepuasan Layanan Sekretariat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada Semester I dan II. Pada semester I dilaksanakan pada bulan Juni 2026 dan Semester II dibulan Desember 2026. Kemudian pada akhir tahun, kedua nilai tersebut di rerata untuk mendapatkan nilai akhir indeks kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Perekonomian. Pada tahun 2025, indeks final kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Adalah 3,56 dengan predikat Sangat Baik, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Ketanggapan pelayanan (*Responsiveness*), indeks 3,54 – Sangat Baik
- (2) Keandalan pelayanan (*Reability*), indeks 3,55 – Sangat Baik
- (3) Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*), indenks 3,53 – Sangat Baik
- (4) Kepastian pelayanan (*Assurance*), indeks 3,57 – Sangat Baik
- (5) Sikap dalam pelayanan (*Emphaty*), indeks 3,60 – Sangat Baik

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penguatan Infrastruktur layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian	Terlaksana	Penguatan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan dan optimalisasi layanan Sekretariat. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan layanan, meningkatkan keandalan sistem dan sarana kerja, serta mendukung penyelenggaraan layanan yang efektif dan efisien.
2.	Penguatan sikap pegawai dalam melaksanakan	Terlaksana	Penyelenggaraan sosialisasi atau workshop penguatan kapasitas SDM. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

	pelayanan kepada unit teknis		meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan kesadaran pegawai dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan
3.	Pelaksanaan Program-program pendampingan kepada unit kerja	Terlaksana	Kegiatan <i>coaching</i> dan bimbingan telah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
4.	Pelaksanaan dan pengolahan hasil data rekapitulasi survey	Terlaksana	Penyusunan draft survey kepuasan layanan Sekretariat Semester I 2026, tidak hanya terlepas pada pembuatan <i>link</i> survey, tetapi termasuk juga penyusunan segala administrasi yang terdiri dari : • Draft ND permintaan pengisian survey layanan; • Draft ND penyampaian hasil laporan survey semester I 2026; • Draft Laporan Kepuasan Layanan; • Draft daftar survey <i>question</i> yang akan disampaikan kepada responden; • Editing <i>Flayer Survey</i> sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi kepada para responden.
5.	Penyusunan Laporan Kepuasan Layanan Semester I	Terlaksana	Laporan survey kepuasan layanan Sekretariat semester I 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil survey kepuasan layanan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat. Laporan ini menjadi lampiran pada Nota Dinas penyampaian hasil survey kepuasan layanan

			Sekretariat kepada pimpinan.
--	--	--	------------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Identifikasi permasalahan dan meningkatkan kompetensi pegawai
- Analisis hasil survey dan identifikasi area perbaikan
- Penyusunan rencana tindak lanjut penyempurnaan layanan tahun 2026
- Peningkatan pemahaman pegawai terkait standar dan budaya pelayanan
- Pemeliharaan dan optimalisasi fasilitas pendukung layanan
- Zoom Meeting mampu mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja di lingkungan Kementerian
- Perhatian pimpinan dan pejabat di lingkungan Kementerian koordinator Bidang Perekonomian yang mendorong terwujudnya layanan
- Ketanggapan dalam pelayanan dan kesesuaian informasi yang diberikan oleh setiap pegawai Sekretariat mampu mendorong peningkatan kepuasan layanan yang diberikan
- Kecepatan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan
- Kepastian layanan dalam menyelesaikan kendala/laporan yang diterima oleh unit kerja

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa penghematan anggaran melalui optimalisasi ruang rapat sebagai sarana pendukung agenda RB.

- Penggunaan aplikasi via zoom untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam forum rapat sehingga memberikan ruang kepada seluruh peserta rapat untuk dapat mengikuti acara yang telah direncanakan.
- Penggunaan aplikasi penyimpanan berbasis Cloud, seperti Gdrive
- Penggunaan aplikasi dalam pelaporan dan pengukuran laporan kinerja
- Penggunaan aplikasi dalam menyampaikan kendala/laporan
- Monitoring dan evaluasi layanan yang diberikan kepada penerima layanan
- Koordinasi antar layanan untuk meningkatkan keahaman dan keselarasan dalam menyelesaikan laporan

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Ekspektasi tinggi penerima layanan dengan layanan yang diberikan oleh Sekretariat
- Terkendalanya aplikasi layanan karena gangguan jaringan
- Tingkat efektifitas pelaksanaan sosialisasi atau pendampingan kinerja yang diberikan kepada unit kerja
- Kepatuhan penerima layanan pada batas tenggang waktu pengumpulan dokumen
- Hasil kepuasan layanan Sekretariat tiap tahun selalu bernilai diatas 3,01 atau berpredikat Sangat Memuaskan, terkadang hal ini menjadi luput dari perhatian untuk dapat ditingkatkan dan dipertahankan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada Triwulan II ini agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Semakin meningkatkan layanan yang akan diberikan kepada unit kerja sebagai penerima layanan, penguatan pada 5 (lima) aspek peningkatan kualitas layanan
- Pemeliharaan berkala pada aplikasi layanan, dan pemantauan laporan gangguan jaringan
- Menyampaikan materi sosialisasi yang dapat dipahami penerima layanan dan memastikan setiap unit kerja memahami substansi yang diberikan
- Melaksanakan *Follow Up* kepada para PIC unit kerja
- Menjaga koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan terkait hasil nilai dan evaluasi kepuasan layanan, agar dapat terus menjadi perhatian dari pimpinan

6

Sasaran Program 6 : Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Pencapaian Sasaran Program 6 : Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian

6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Eselon I ini merupakan agregat dari nilai persentase pelaksanaan RB di level Eselon II, didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Organisasi, dan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, dan Unit Inspektorat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, nilai persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian yang telah terealisasi sebesar 50% atau mencapai 100% dari target Triwulan II 2026 dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%Kinerja
IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	%	50%*	50%*	100%*

*nilai bersifat penilaian mandiri, nilai dihasilkan akhir tahun

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	Terlaksana	Laporan kinerja Triwulan II Sekretariat sudah disusun kemudian ditetapkan oleh Menteri yang dilanjutkan dengan proses upload ke dalam Aplikasi Kinerja Ekon GO beserta dengan Data Dukung Kinerja di Triwulan II (https://kinerja.ekon.go.id)
2.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI pada Triwulan II	Terlaksana	• Bimbingan Teknis Pengawasan Pengelolaan Arsip Dinamis yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2026 • Pelaksanaan Alih Media Arsip Siap Unggah Hasil Identifikasi Arsip terbuka untuk Publik • Pemberkasan pada Aplikasi SRIKANDI • Monitoring keaktifan user aplikasi SRIKANDI pada 35 unit pengolah

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

- Optimalisasi penggunaan SRIKANDI dalam distribusi persuratan
- Penyampaian ND usulan nama anggota tim percepatan RB di lingkungan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
- Menghadiri penyusunan rencana aksi RB General tahun 2026 yang di ketuai oleh Biro Hukum dan Organisasi
- Penyusunan Draft laporan SPIP dan penetapan Kertas Kerja pengisian SPIP semester II
- Mengoptimalkan akselerasi aplikasi dan website kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- Mensosialisasikan nama-nama tim pelaksana agen perubahan yang mempunyai tugas sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi Solusi, mediator, dan penghubung.
- Melaksanakan digital *working system* dan evaluasi pelaksanaan *Work From Anywhere*
- Mengkoordinasikan permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan I dan II pada level entitas eselon I dan II di seluruh unit kedeputian
- Menyusun *draft* final laporan kinerja triwulan I dan II pada lingkup Sekretariat dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
- Menjabarkan hasil analisis capaian kinerja yang mendalam dan pengukuran kinerja sesuai dengan formulasi yang ditetapkan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Penghematan kertas dan ruang arsip, dengan dashboard dan cloud dapat mempercepat pencarian dokumen pendukung dan efisiensi waktu kerja pegawai;
- Menyusun program dan anggaran yang lebih tepat sasaran dengan kegiatan;
- Peningkatan produktivitas pegawai dan optimalisasi penggunaan sarana kantor;
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive, One Drive, dst);
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting kantor;
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelola kinerja EKON GO.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang Triwulan II yaitu Rp. 63.665,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Belum tersosialisasikannya RB Tematik oleh KemenPAN RB, berakibat pada terhambatnya penetapan Persesmenko tentang Rencana Aksi RB tahun 2026;
- Koordinasi penyusunan Bahan Paparan untuk rapat pimpinan terkendala dengan distribusi akses dokumen antar kelompok substansi;
- Kendala Aplikasi SRIKANDI menjadi hambatan dalam proses legalisasi surat untuk disampaikan kepada unit kerja.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Aktif melaksanakan koordinasi dengan KemenPAN RB terkait tematik RB yang akan ditetapkan pada tahun 2026;
- Menggunakan aplikasi berbagi *realtime* dalam menyusun bahan paparan untuk *Breakfast Meeting* atau *Forum Grup Discussion*;
- Berkoordinasi dengan kelompok kerja Data Sistem Informasi (DSI) dalam pemeliharaan aplikasi SRIKANDI;

- Penguatan kegiatan dengan anggaran terbatas, agar anggaran yang telah di efisiensi tetap mendukung ketercapaian kinerja;
- Melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait standar dokumen bukti dukung yang harus di *upload* dan batas waktu pengumpulannya.

Jakarta, 22 Juli 2026
Sekretaris Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian



Susiwijono 